

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sehubungan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 maka peneliti menyimpulkan untuk setiap rasio yang dianalisis dalam uraian singkat di bawah ini:

A. Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT Yang Memperoleh Opini WTP.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan menggunakan 5 rasio maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian ternyata seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang mendapat opini WTP pada tahun 2018 dan 2019 memiliki rata-rata rasio dibawah 19%, yang berarti tingkat kemandiriannya mendapat predikat rendah.
- 2) Persentase Efektifitas Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang memperoleh opini WTP lebih tinggi dibanding PEMDA yang memperoleh opini WDP. Rata-rata persentase rasio efektifitas keuangan Kabupaten/Kota yang mendapat opini WTP sudah efektif dengan interval rasio dari 77-107% di TA 2018 dan memperoleh persentase sebesar 82-109% di TA 2019.
- 3) Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang mendapat opini WTP di TA 2018 dan TA 2019 belum mencapai kriteria Sangat efisien karena persentase rasio efisiensi mereka masih di atas 60%.

- 4) Rata-rata PEMDA yang memperoleh opini WTP lebih dominan menganggarkan dananya pada belanja operasi, dapat dikatakan demikian karena persentase Belanja Operasi lebih tinggi dibanding Belanja Modal yaitu berada di atas 60% sedangkan persentase Belanja Modal dibawah 32%.
- 5) Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang memperoleh opini WTP mengalami peningkatan atau pertumbuhan keuangan secara positif ditandai dengan tidak adanya persentase bernilai negatif dalam rata-rata rasio pertumbuhan keuangan.

B. Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT Yang Memperoleh Opini WDP.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan menggunakan 5 rasio maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kemandirian keuangan daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang memperoleh opini WDP pada tahun 2018 dan 2019 dinilai sangat rendah karena rata-rata persentase rasionya berada di bawah 25% dengan pola hubungan instruktif.
- 2) Rata-rata untuk Kabupaten/Kota yang mendapat opini WDP memiliki persentase rasio efektifitas dengan interval rasio dari 60-107% pada TA 2018 dan memperoleh persentase sebesar 64-113% pada TA 2019 yang rata-rata kinerja keuangannya dapat dikatakan efektif.

- 3) Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTT yang mendapat opini WDP di TA 2018 dan TA 2019 belum mencapai kriteria Sangat Efisien karena persentase rasio efisiensi mereka masih di atas 60%.
- 4) Rata-rata PEMDA yang memperoleh opini WDP di TA 2018 dan 2019 lebih dominan mengalokasikan dananya pada belanja operasi, dapat dikatakan demikian karena persentase Belanja Operasi lebih tinggi dibanding Belanja Modal yaitu berada di atas 72% sedangkan persentase Belanja Modal dibawah 32%.
- 5) Terdapat 5 Kabupaten yang memperoleh opini WDP di TA 2018 mengalami penurunan ditandai dengan persentase pertumbuhan keuangan mereka yang bernilai negatif. Sedangkan di TA 2019 hanya ada 1 kabupaten yang beropini WDP yang mengalami penurunan yaitu Sumba Barat dengan persentase -5%.

C. Perbandingan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi NTT Yang Memperoleh Opini WTP.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan menggunakan 5 rasio maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara Kabupaten/Kota di provinsi NTT yang mendapat opini WTP maupun WDP, karena semua kinerja keuangan dinilai sangat rendah berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian daerah.
- 2) Tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara Kabupaten/Kota di provinsi NTT yang mendapat opini WTP maupun WDP, daerah yang mendapat opini WTP tidak selalu mendapat predikat Efektif

begitu pula dengan daerah yang mendapat opini WDP tidak selalu mendapat predikat Tidak Efektif.

- 3) Tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara Kabupaten/Kota di provinsi NTT yang mendapat opini WTP maupun WDP dinilai dari rasio efisiensi keuangan daerah, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Perbandingan besar kecilnya tingkat efisiensi terletak pada perbandingan antara realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan daerah.
- 4) Tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara Kabupaten/Kota di provinsi NTT yang mendapat opini WTP maupun WDP, opini audit WTP tidak selalu menjamin keserasian antara belanja operasi dan belanja modal daerah tersebut, semakin besar persentase belanja operasi maka persentase belanja modal akan semakin kecil begitu pula sebaliknya.
- 5) Tidak ada perbedaan kinerja keuangan antara Kabupaten/Kota di provinsi NTT yang mendapat opini WTP maupun WDP dinilai dari rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah, opini audit WTP tidak selalu menjamin suatu daerah akan mengalami peningkatan atau pertumbuhan keuangan ke arah positif, begitu pula dengan daerah yang mendapat opini WDP tidak selalu akan mengalami penurunan atau pertumbuhan ke arah negatif. Namun jika melihat hasil perhitungan rasio pada Bab V berarti Kabupaten/Kota di provinsi

NTT telah berupaya memaksimalkan kinerja keuangannya yang ditandai dengan berkurangnya persentase bernilai negatif di TA 2019 dibanding dengan TA 2018.

6.2. Saran.

Berdasarkan hasil analisis maka peneliti dapat memberikan saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT dengan opini WTP dan WDP sebagai berikut:

1. Kemandirian keuangan seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT dinilai Sangat Rendah dengan persentase rasio antara 0%-18%, hal ini disebabkan karena jumlah Pendapatan Dari Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada jumlah Pendapatan Asli Daerah yang ada. Oleh karena itu setiap Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan daerah dari potensi daerah yang telah ada. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan PAD lewat pengoptimalan penerimaan sumber-sumber PAD seperti pemungutan pajak dan retribusi serta melakukan pengawasan dan pengendalian yang teroganisir dengan baik dan berkelanjutan agar dapat menghindari penyimpangan dalam pemungutan PAD.
2. Kinerja keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT rata-rata mendapat predikat cukup efektif, hal ini menunjukan bahwa Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi NTT memasang target yang terlalu tinggi dibandingkan dengan jumlah PAD yang mampu diterima, dan kurangnya usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD di setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mengevaluasi

ulang penerimaan PAD dan disesuaikan dengan kemampuan penerimaan PAD yang nyata dari setiap daerah agar tidak memasang target anggaran tahun berjalan yang berlebihan tetapi target yang ada sudah disesuaikan dengan fakta di lapangan.

3. Kinerja keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT dinilai cukup efisien, hal ini menandakan bahwa Pemerintah Daerah belum mampu mengelola keuangan yang ada sehingga jumlah belanja mendekati atau bahkan melebihi jumlah pendapatan yang ada. Oleh karena itu, Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT diharapkan lebih bijak dalam menggunakan pendapatan yang ada dan meminimalisir jumlah belanja sebaik mungkin agar tidak melebihi pendapatan yang ada. Salah satu cara untuk meminimalisir jumlah belanja yang ada adalah dengan mengurangi jumlah anggaran untuk kegiatan yang kurang berdampak bagi masyarakat seperti perjalanan dinas, belanja barang dan jasa yang tidak terlalu mendesak dan juga kegiatan seminar.
4. Rata-rata Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT lebih dominan mengalokasikan dananya pada belanja langsung (operasional) hal ini sudah baik, karena belanja operasional penting untuk menunjang output yang dihasilkan Pemerintah Daerah nantinya.
5. Rata-rata Kabupaten dan Kota di Provinsi NTT mengalami pertumbuhan keuangan secara positif dan hanya 1 Kabupaten yang mengalami pertumbuhan secara negatif, oleh karena itu Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT diharapkan lebih mengoptimalkan penerimaan PAD yang ada agar dapat mengalami pertumbuhan keuangan ke arah positif, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah Daerah diharapkan lebih memperhatikan penerimaan PAD dan Pendapatan lainnya jika ingin mengalami pertumbuhan keuangan yang positif, Pemerintah juga diharapkan lebih berupaya agar sebisa mungkin menghindari penurunan pendapatan atau bahkan kondisi stagnan keuangan daerahnya, demi tercapainya kesejahteraan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin. 1993 *“Auditing suatu pendekatan terpadu”* Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Boynton, William C dkk. 2003 *“Modern Auditing edisi ketujuh”* Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A dkk. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : “Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3”*. Jakarta Salemba Empat.
- Jumingan. 2017 *“Analisis Laporan Keuangan”*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kasmir. 2016 *“Analisis Laporan Keuangan”* Jakarta. PTRajaGrafindo Persada.
- Mahsun, Mohammad. 2009 *“Pengukuran kinerja sektor public”*. Yogyakarta: BPFE
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*: Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*: Penerbit ANDI. Yogyakarta
- Pratiwi, Wiwik. 2016 *“Audit Sektor Publik Mencapai Akuntabilitas Melalui Audit Laporan Keuangan Untuk Menjamin Transparansi Organisasi Sektor Publik”*. Jakarta: In Media.
- Ratmono, Dwi. 2017 *“Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua”*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siregar, Syofian. 2015. *“Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS”*. Jakarta: Kencana.
- Suharsaputra, Uhar. 2014. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Tindakan”*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukrisno, Agoes. 2004. *“Auditing (Pemeriksaan Akuntansi)”*, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- Firmanzah. 2012. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Negara. (<http://www.setkab.go.id>) diakses tanggal 25 Maret 2021
- Astuty Elgia.2012” Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”dalam Jurnal Publika(volume 1.No 2).Madiun:UNESCA (<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/in>) diakses tanggal 24 Maret 2021.
- Kurnia,Riki dkk.2019.”*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Non WTP (Studi Empiris Pada Laporan Keuangan Kabupaten/Kotadi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017)*” dalam Jurnal Eksplorasi Akuntansi volume 1(hlm. 781-794).Padang:Universitas Negeri Padang.(online) (<http://jea.ppi.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/110>) diakses tanggal 20 Maret 2021
- Ks,Lazyra.2016”*Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan.* (<https://core.ac.uk/download/pdf/225828012.pdf>) diakses tanggal 25 Maret 2021.
- Nurabiah.2018.”*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*” dalam Jurnal Akuntansi FEB Unram volume 3(no.1).Mataram:Universitas Mataram. (<https://media.neliti.com/media/publications/279671-analisis-perbandingan-kinerja-keuangan-p-4f0b0385.pdf>) diakses tanggal 24 Maret 2021.
- Tarmizi ,Rosmiyanti dkk.2014”*Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Setelah Memperoleh Opini Wtp*”dalam Jurnal Akuntansi & Keuangan volume 5(hlm.71-90).Bandar Lampung:Universitas Bandar Lampung. (<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jak/article/view/546>) diakses tanggal 24 Maret 2021.

Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara.

<https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, Ragam Opini Audit Oleh BPK.
(diakses tanggal 26 Maret 2021.)

<https://ntt.bpk.go.id/siaran-pers-penyerahan-lhp-lkpd-ta-2014-pemerintah-provinsi-ntt/>, Siaran Pers LHP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2014.
(diakses tanggal 26 Maret 2021.)

<http://kupang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/06/Siaran-Pers-LHP-LKPD-TA-2015-Provinsi-NTT.pdf>, Siaran pers LHP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2015..
(diakses tanggal 26 Maret 2021.)

<http://www.bpkp.go.id/ntt/berita/read/15220/165/Sinergi-Perwakilan-BPKP-NTT-dan-BPK-RI-Perwakilan-NTT-Dalam-Mengawal-Akuntabilitas-Laporan-Keuangan-.bpbk> Siaran Pers LHP Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2016.
(diakses tanggal 26 Maret 2021.)